

PEMBERDAYAAN PATBM MELALUI PENGUATAN KAPASITAS KADER DAN TATA KELOLA PERLINDUNGAN ANAK

Fuad Ardiansyah^{1*}, Muhamad Hasan Rumlus², Sofyan Muhamad³,
Azzahra Dwi Kanaya B.⁴, Mutiara Nurfadilah Semarang⁵, Noa Krisna Werfete⁶

^{1,5}Program Studi Psikologi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

^{2,4,6}Program Studi Hukum, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

fuadardiansyah@unimudasorong.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan yang membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman kader mengenai perlindungan anak, memperkuat kemampuan pencegahan dan deteksi dini kekerasan, serta menguatkan tata kelola kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kampung Jeflio, Kabupaten Sorong. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), pelatihan perlindungan anak, pelatihan pencegahan dan deteksi dini kekerasan, pendampingan, serta penyediaan perangkat kelembagaan, dengan melibatkan 18 kader dan calon kader PATBM Kampung Jeflio. Pemahaman kader diukur melalui kuesioner *pre-test* dan *post-test*, sedangkan kemampuan deteksi dini diukur melalui kombinasi hasil *pre-test post-test* dan penilaian observasi simulasi berbasis rubrik. Hasil evaluasi menunjukkan nilai rata-rata pemahaman kader meningkat dari 59,4 menjadi 81,1 (*N-Gain* 53,1%; 14 dari 18 kader atau 77,8% mencapai kategori memahami), sedangkan pada aspek deteksi dini nilai rata-rata *post-test* mencapai 81,7 dan nilai simulasi 72,2, dengan 15 dari 18 kader (83,3%) dinyatakan mampu melakukan deteksi dini serta simulasi pencegahan kekerasan anak. Kegiatan juga menghasilkan penguatan tata kelola kelembagaan berupa 50 eksemplar Buku Saku SOP Jalur Rujukan Perlindungan Anak dan format pencatatan serta pelaporan kasus untuk mendukung keberlanjutan PATBM.

Kata Kunci: PATBM; Tata Kelola PATBM; Perlindungan Anak; Kapasitas Kader; Deteksi Dini Kekerasan.

Abstract: Violence against children remains an issue that requires community involvement in prevention and response efforts. This community service initiative aims to improve cadres' understanding of child protection, strengthen their prevention and early-detection skills, and reinforce the institutional governance of Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) in Jeflio Village, Sorong Regency. The program was implemented through outreach sessions, Focus Group Discussions (FGDs), child protection training, prevention and early-detection training, mentoring, and the provision of institutional tools, involving 18 PATBM cadres and cadre candidates in Jeflio Village. Cadres' understanding was measured using a pre-test/post-test questionnaire, while early-detection ability was measured through a combination of pre-test/post-test results and rubric-based simulation observation. The evaluation showed the average understanding score rising from 59.4 to 81.1 (*N-Gain* 53.1%; 14 of 18 cadres, or 77.8%, reached the "understanding" category), while for early detection the average post-test score reached 81.7 and the simulation score 72.2, with 15 of 18 cadres (83.3%) assessed as capable of performing early detection and prevention simulations. The activity also produced institutional strengthening in the form of 50 copies of a Pocket Guide on Standard Operating Procedures (SOPs) for the Child Protection Referral Pathway, as well as case documentation and reporting forms to support the sustainability of the PATBM.

Keywords: PATBM; PATBM Governance; Child Protection; Cadre Capacity; Early Detection Of Violence.



Article History:

Received: 27-08-2026

Revised : 15-09-2026

Accepted: 16-09-2026

Online : 06-10-2026



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan global yang kompleks karena terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, eksploitasi, dan penelantaran yang berdampak terhadap perkembangan anak secara menyeluruh. Studi global menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan strategi pencegahan terpadu karena dampaknya dapat berlangsung hingga masa dewasa (Hillis et al., 2016). Pendekatan perlindungan anak saat ini tidak lagi hanya berfokus pada respons setelah kasus terjadi, tetapi mulai diarahkan pada penguatan sistem pencegahan melalui keterlibatan keluarga, komunitas, dan lembaga layanan sosial (WHO, 2016; Zakaria, 2025). Dalam kerangka tersebut, pendekatan perlindungan anak berbasis masyarakat menjadi penting karena komunitas memiliki posisi strategis dalam mengenali risiko, membangun norma perlindungan, serta melakukan intervensi awal terhadap persoalan yang dialami anak (Ellermeijer et al., 2025).

Di Indonesia, tantangan perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan tingginya risiko kekerasan, tetapi juga dengan keterbatasan kapasitas masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pelaporan kasus. Berbagai persoalan seperti rendahnya literasi hak anak, budaya penyelesaian masalah secara informal, keterbatasan akses layanan, dan lemahnya mekanisme rujukan masih menjadi hambatan dalam membangun sistem perlindungan anak yang efektif (Stark et al., 2012; Putra et al., 2025). Kondisi tersebut semakin kompleks pada wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan akses layanan terbatas karena masyarakat menjadi aktor pertama yang berhadapan dengan persoalan anak (Alfandari & Taylor, 2022). Permasalahan serupa ditemukan pada mitra pengabdian, yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kampung Jeflio, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. PATBM Kampung Jeflio telah terbentuk sejak tahun 2022 dengan 16 kader definitif, namun hasil asesmen awal (FGD) tim pengabdian menunjukkan bahwa sebagian besar kader belum pernah mengikuti pelatihan formal mengenai prinsip perlindungan anak dan keterampilan deteksi dini kekerasan, sementara SOP Jalur Rujukan Perlindungan Anak yang telah disahkan pada tahun 2025 belum diterapkan secara konsisten karena minimnya panduan operasional dan perangkat pencatatan kasus di tingkat kampung. Kondisi awal tersebut menegaskan bahwa mitra masih membutuhkan penguatan kapasitas kader, peningkatan pemahaman perlindungan anak, keterampilan deteksi dini kekerasan, implementasi SOP jalur rujukan, serta tata kelola pencatatan dan pelaporan kasus.

Penguatan kapasitas kader menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan anak berbasis masyarakat. Kader yang memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai mampu berperan sebagai penghubung antara keluarga, komunitas, dan layanan perlindungan

formal dalam melakukan pencegahan maupun respons awal terhadap kasus kekerasan anak (Sampasa-Kanyinga et al., 2020; Wahda et al., 2025). Selain itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa pelatihan, pendampingan, dan peningkatan keterampilan lokal dapat memperkuat keberlanjutan program perlindungan anak karena masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap sistem yang dibangun (Rohmah & Julianti, 2025). Oleh sebab itu, penguatan kapasitas kader PATBM tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pemahaman konseptual mengenai hak anak, tetapi juga untuk membangun kemampuan praktis dalam melakukan pencegahan, identifikasi risiko, komunikasi awal, dan mekanisme rujukan yang sesuai.

Selain kapasitas individu kader, aspek tata kelola kelembagaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat. Organisasi perlindungan anak di tingkat komunitas membutuhkan perangkat kerja yang jelas berupa prosedur operasional, sistem pencatatan, mekanisme pelaporan, pembagian peran, serta koordinasi dengan lembaga layanan formal (Pananrangi & Aswar, 2026). Penelitian tentang pengambilan keputusan perlindungan anak berbasis komunitas menunjukkan bahwa efektivitas layanan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor lokal dalam bekerja secara kolaboratif dan menggunakan mekanisme kerja yang terstruktur (Alfandari & Taylor, 2022; Sari et al., 2025). Hal tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan kelembagaan seperti PATBM tidak cukup hanya melalui pembentukan organisasi, tetapi perlu diperkuat melalui sistem kerja yang mampu menjamin keberlanjutan perlindungan anak di tingkat masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan pendekatan perlindungan anak berbasis masyarakat melalui PATBM sebagai strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Studi implementasi PATBM menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh faktor kapasitas kader, dukungan kelembagaan, komunikasi antaraktor, dan keberlanjutan koordinasi (Amanda & Helmi, 2025). Penelitian lain mengenai evaluasi PATBM juga menunjukkan bahwa penguatan sumber daya manusia dan dukungan sistem lokal diperlukan agar PATBM mampu menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan secara efektif (Rinah et al., 2022). Dengan demikian, kebutuhan penguatan PATBM Kampung Jeflio memiliki relevansi dengan berbagai temuan penelitian mengenai tantangan implementasi perlindungan anak berbasis masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi berupa pemberdayaan PATBM melalui penguatan kapasitas kader dan tata kelola perlindungan anak. Pendekatan yang dilakukan diarahkan pada peningkatan kemampuan kader melalui

sosialisasi, pelatihan perlindungan anak, penguatan peran PATBM, serta pelatihan pencegahan dan deteksi dini kekerasan terhadap anak. Selain itu, kegiatan juga memberikan penguatan aspek kelembagaan melalui penyediaan perangkat pendukung berupa Buku Saku SOP Jalur Rujukan Perlindungan Anak, format pencatatan, serta mekanisme pelaporan kasus. Pendekatan tersebut dipilih karena penguatan sistem perlindungan anak membutuhkan kombinasi antara peningkatan kapasitas manusia dan pengembangan mekanisme organisasi yang mampu berjalan secara berkelanjutan. Pengembangan mekanisme rujukan dan kerja kolaboratif juga terbukti menjadi unsur penting dalam memastikan komunitas mampu terhubung dengan layanan perlindungan formal.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberdayakan PATBM Kampung Jeflio melalui peningkatan kapasitas kader dan penguatan tata kelola perlindungan anak berbasis masyarakat. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman kader mengenai prinsip perlindungan anak, meningkatkan kemampuan kader dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini kekerasan terhadap anak, serta memperkuat mekanisme kelembagaan melalui penyediaan perangkat kerja perlindungan anak yang lebih terstruktur. Tujuan tersebut sejalan dengan pendekatan sistem perlindungan anak yang menekankan pentingnya keterlibatan komunitas, penguatan kapasitas lokal, dan koordinasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas (community-based empowerment) dengan menempatkan kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai subjek utama dalam penguatan sistem perlindungan anak. Kegiatan dosen dilaksanakan melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, diskusi kelompok terarah, simulasi, pendampingan, serta evaluasi. Sementara itu, mahasiswa terlibat dalam kegiatan pendukung berupa persiapan kegiatan, fasilitasi pelaksanaan, dokumentasi, pendampingan peserta, dan membantu proses evaluasi. Pendekatan partisipatif ini digunakan agar mitra tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga terlibat aktif dalam proses identifikasi kebutuhan, pelaksanaan program, dan penguatan keberlanjutan PATBM.

Mitra kegiatan adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kampung Jeflio, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Mitra terdiri atas 16 kader definitif PATBM, yaitu 5 laki-laki dan 11 perempuan, yang berasal dari berbagai unsur masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang beragam. Pada pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan evaluasi, turut dilibatkan calon kader tambahan sehingga total peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan

dan evaluasi pretest-posttest berjumlah 18 orang. Berdasarkan hasil identifikasi awal, permasalahan utama mitra meliputi belum optimalnya pemahaman kader mengenai perlindungan anak, keterampilan pencegahan dan deteksi dini kekerasan terhadap anak, implementasi SOP Jalur Rujukan, sistem pencatatan dan pelaporan kasus, serta penguatan tata kelola kelembagaan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian disusun dalam tiga bagian besar, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan kegiatan inti, serta monitoring dan evaluasi. Pada tahap pra kegiatan (20 Juni 2026), tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pemerintah kampung dan pengurus PATBM, sosialisasi program, dan Focus Group Discussion (FGD) awal yang diikuti oleh 18 kader dan calon kader beserta aparat kampung, sekaligus digunakan untuk identifikasi kebutuhan mitra serta penyusunan materi dan instrumen evaluasi.

Tahap kegiatan inti dilaksanakan dalam tiga kegiatan tatap muka selama satu hari penuh pada masing-masing pertemuan, yaitu: pelatihan perlindungan anak dan penguatan peran PATBM (4 Juli 2026) yang diikuti 18 peserta melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan pembahasan kasus mengenai hak anak, bentuk kekerasan, dan pengasuhan positif; pelatihan pencegahan dan deteksi dini kekerasan terhadap anak (25 Juli 2026) yang diikuti 18 peserta melalui metode simulasi dan studi kasus mengenai pengenalan tanda risiko dan langkah respons awal; serta penguatan tata kelola PATBM (8 Agustus 2026) berupa penyusunan dan finalisasi Buku Saku SOP Jalur Rujukan Perlindungan Anak beserta penerapan perangkat pencatatan dan pelaporan kasus, yang turut diikuti oleh pengurus PATBM dan aparat kampung. Adapun tahap monitoring dan evaluasi dilakukan baik selama kegiatan berlangsung maupun pascakegiatan melalui observasi, diskusi, pre-test, post-test, simulasi, dan telaah dokumen, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksana Kegiatan

Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, evaluasi proses saat kegiatan berlangsung melalui observasi keaktifan peserta, diskusi, tanya jawab, dan refleksi terhadap materi yang diberikan. Kedua, evaluasi hasil dilakukan setelah kegiatan melalui perbandingan *pre-test* dan *post-test*, observasi praktik kader dalam simulasi, serta telaah terhadap penggunaan perangkat kelembagaan yang telah diberikan. Pemahaman konsep perlindungan anak diukur menggunakan kuesioner pretest-posttest berjumlah maksimal 15 item pernyataan, dengan item yang sama digunakan pada saat pretest maupun posttest untuk menjaga konsistensi pengukuran.

Peningkatan skor dihitung menggunakan rumus N-Gain (skor posttest dikurangi skor pretest, dibagi selisih skor maksimum ideal dengan skor pretest), dengan kategori tinggi ($N\text{-Gain} \geq 0,7$), sedang ($0,3 \leq N\text{-Gain} < 0,7$), dan rendah ($N\text{-Gain} < 0,3$). Adapun kemampuan deteksi dini dan simulasi pencegahan dinilai melalui kombinasi skor posttest dan lembar observasi simulasi berbasis rubrik, yang mencakup kemampuan mengenali tanda atau risiko kekerasan, melakukan deteksi dini, menentukan tindakan pencegahan, melakukan komunikasi atau respons awal, serta menjalankan alur simulasi sesuai prosedur; kader dinyatakan mampu apabila memenuhi standar minimal pada kedua komponen penilaian tersebut. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian program sekaligus menjadi dasar dalam menyusun tindak lanjut penguatan PATBM Kampung Jeflio.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi Program dan *Focus Group Discussion* (FGD) Penguatan PATBM

Tahap awal kegiatan pengabdian dilakukan melalui sosialisasi program dan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kampung Jeflio pada 20 Juni 2026, yang diikuti oleh 18 kader dan calon kader beserta aparat kampung. Kegiatan ini bertujuan membangun kesamaan pemahaman antara tim pengabdian dan mitra mengenai urgensi perlindungan anak berbasis masyarakat, peran strategis PATBM, serta kebutuhan penguatan kapasitas kader dalam menjalankan fungsi pencegahan dan respons awal terhadap permasalahan perlindungan anak. Melalui FGD, tim pengabdian bersama mitra melakukan identifikasi terhadap kondisi awal, tantangan kelembagaan, serta kebutuhan penguatan yang diperlukan dalam pelaksanaan PATBM di tingkat kampung. Hasil langsung dari tahap ini adalah tersusunnya kesamaan persepsi dan konfirmasi kebutuhan mitra yang menjadi dasar penyusunan materi pada tahap pelatihan berikutnya.

Pelaksanaan FGD menunjukkan bahwa proses pemberdayaan perlu diawali dengan pemahaman bersama mengenai masalah dan kebutuhan mitra. Pendekatan ini penting karena program berbasis masyarakat akan lebih efektif apabila masyarakat terlibat sejak tahap awal perencanaan. Masyarakat dan PATBM sebagai aktor lokal memiliki peran penting dalam

perlindungan anak karena mereka berada paling dekat dengan kehidupan anak dan keluarga, sehingga mampu mengenali risiko yang sering tidak terlihat oleh sistem formal (Roche & Flynn, 2020).

Selain itu, keterlibatan Masyarakat dan PATBM melalui forum diskusi memungkinkan proses transfer pengetahuan berlangsung secara dua arah. Masyarakat dan PATBM tidak hanya menerima materi dari tim pengabdian, tetapi juga memberikan informasi mengenai kondisi sosial, budaya, dan hambatan lokal yang memengaruhi perlindungan anak. Pendekatan seperti ini sejalan dengan konsep *community-based child protection* yang menempatkan komunitas sebagai bagian dari sistem perlindungan, bukan sekadar penerima layanan. Penguatan perlindungan anak berbasis komunitas membutuhkan partisipasi aktif institusi lokal agar mekanisme perlindungan dapat berjalan sesuai konteks Masyarakat (Panda et al., 2020). Dengan demikian, kegiatan sosialisasi dan FGD menjadi fondasi penting sebelum memasuki tahap pelatihan karena membantu memastikan bahwa intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata mitra. Hal ini juga memperkuat rasa kepemilikan (*ownership*) kader terhadap program sehingga keberlanjutan PATBM setelah kegiatan pengabdian lebih memungkinkan untuk dicapai.

2. Pelatihan Perlindungan Anak dan Penguatan Peran Kader PATBM

Pelatihan perlindungan anak dan penguatan peran PATBM dilaksanakan pada 4 Juli 2026 dan diikuti oleh 18 peserta untuk meningkatkan kapasitas kader dalam memahami prinsip perlindungan anak, hak anak, bentuk kekerasan terhadap anak, pengasuhan positif, serta fungsi PATBM dalam sistem perlindungan anak berbasis masyarakat. Kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan pembahasan kasus yang berkaitan dengan kondisi masyarakat setempat. Output langsung dari kegiatan ini adalah terlaksananya satu kegiatan pelatihan perlindungan anak dan tersampainya materi edukasi hak anak serta pengasuhan positif kepada seluruh peserta.



Gambar 2. Pemaparan Materi SOP



Gambar 3. Pendampingan Penanganan kasus

Dokumentasi tersebut memperlihatkan keterlibatan aktif peserta dalam diskusi dan pembahasan kasus, yang selaras dengan hasil kegiatan berupa peningkatan pemahaman kader mengenai prinsip perlindungan anak sebagaimana ditunjukkan pada evaluasi pretest-posttest di Tabel 1. Peningkatan kapasitas kader menjadi salah satu aspek utama dalam penguatan PATBM karena kader merupakan aktor pertama yang berinteraksi dengan keluarga dan anak ketika muncul indikasi permasalahan perlindungan. Driscoll (2020) menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aktor komunitas dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memberikan perlindungan awal terhadap anak, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan formal.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan memberikan dasar pengetahuan yang diperlukan kader untuk menjalankan fungsi PATBM secara lebih optimal. Hal tersebut terjadi karena metode pelatihan tidak hanya memberikan informasi normatif, tetapi juga menghubungkan materi dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman seperti ini penting dalam program pemberdayaan karena perubahan perilaku lebih mudah terjadi ketika peserta memahami relevansi materi terhadap masalah sehari-hari.

Temuan ini sejalan dengan kegiatan penguatan kapasitas kader perlindungan anak yang dilakukan oleh Rizal dan Ulum (2025), yang menunjukkan bahwa metode pelatihan berbasis diskusi dan praktik mampu meningkatkan pemahaman kader mengenai perlindungan anak serta memperkuat kesiapan mereka dalam menjalankan fungsi sosial di masyarakat. Hasil serupa juga ditemukan dalam kegiatan penguatan keterampilan kader perlindungan anak melalui pelatihan *psychological first aid* bagi kelompok perlindungan perempuan dan anak, yang menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas melalui pelatihan mampu memperkuat kemampuan peserta dalam memberikan dukungan awal kepada kelompok rentan (Wahanisa et al., 2025). Dengan demikian, pelatihan dalam kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sumber daya manusia PATBM Kampung Jeflio.

3. Pelatihan Pencegahan dan Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak

Pelatihan pencegahan dan deteksi dini kekerasan terhadap anak dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan praktis kader dalam mengenali faktor risiko, tanda awal kekerasan, serta langkah awal yang dapat dilakukan ketika menemukan indikasi permasalahan perlindungan anak. Kegiatan ini menggunakan metode simulasi dan studi kasus agar kader memperoleh pengalaman langsung dalam menghadapi situasi yang menyerupai kondisi nyata. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, sebanyak 15 dari 18 kader (83,3%) dinyatakan mampu melakukan deteksi dini dan simulasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Capaian tersebut menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis praktik membantu

kader memahami bagaimana melakukan identifikasi awal dan menentukan tindakan yang sesuai dengan peran PATBM.

Peningkatan kemampuan tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), yaitu proses pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung, refleksi, dan penerapan pengetahuan dalam situasi tertentu. Sabon dan Miskan (2025) menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas yang mengintegrasikan pelatihan keterampilan dan dukungan praktis mampu meningkatkan kemampuan komunitas dalam memberikan respons terhadap permasalahan keluarga dan anak.

Selain itu, program perlindungan anak berbasis komunitas membutuhkan pendekatan yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun kemampuan praktis masyarakat dalam melakukan identifikasi risiko dan dukungan awal (Setyawati, 2019). Oleh karena itu, penggunaan simulasi dalam kegiatan ini menjadi pendekatan yang tepat karena membantu kader menerjemahkan konsep perlindungan anak ke dalam tindakan nyata.

4. Penguatan Tata Kelola PATBM melalui SOP Jalur Rujukan dan Instrumen Pencatatan Kasus

Selain meningkatkan kapasitas individu kader, kegiatan pengabdian juga diarahkan pada penguatan tata kelola kelembagaan PATBM melalui penyediaan perangkat pendukung berupa Buku Saku SOP Jalur Rujukan Perlindungan Anak serta format pencatatan dan pelaporan kasus. Penyediaan perangkat kelembagaan tersebut dilakukan karena salah satu kebutuhan utama mitra adalah adanya panduan operasional yang dapat digunakan kader dalam menjalankan mekanisme perlindungan anak. Buku Saku SOP berfungsi sebagai pedoman bagi kader dalam memahami alur rujukan kasus, sedangkan format pencatatan dan pelaporan membantu PATBM melakukan dokumentasi kasus secara lebih sistematis.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan PATBM tidak hanya membutuhkan kader yang memiliki pengetahuan, tetapi juga membutuhkan sistem kerja yang mendukung keberlanjutan organisasi. Implementasi PATBM menunjukkan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh kejelasan struktur kerja, koordinasi antaraktor, serta dukungan kelembagaan yang memadai. Selain itu, penelitian Nisa et al. (2025) menjelaskan bahwa penguatan organisasi perlindungan anak berbasis masyarakat membutuhkan mekanisme administrasi dan pembagian peran yang jelas agar program tidak bergantung pada individu tertentu. Dengan demikian, penyediaan SOP dan instrumen pencatatan dalam kegiatan ini merupakan bentuk penguatan sistem yang mendukung keberlanjutan PATBM Kampung Jeflio.

5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring dilakukan selama proses pelaksanaan kegiatan melalui observasi terhadap keterlibatan kader, keaktifan dalam diskusi, kemampuan mengikuti simulasi, serta respons peserta terhadap materi dan perangkat yang diberikan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur perubahan kapasitas kader dan kesiapan kelembagaan PATBM melalui *pre-test* dan *post-test*, observasi simulasi, serta telaah terhadap perangkat pendukung kelembagaan. Sesuai dengan instrumen dan kriteria penilaian yang telah diuraikan pada bagian Metode Pelaksanaan, hasil evaluasi pada Tabel 1 (peningkatan skor pemahaman dari 59,4 menjadi 81,1 dengan *N-Gain* 53,1%, capaian 14 dari 18 kader/77,8% untuk indikator pemahaman, serta 15 dari 18 kader/83,3% untuk indikator deteksi dini) merupakan hasil pengukuran yang konsisten dan sinkron dengan data yang disajikan pada abstrak dan simpulan.

Tabel 1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian

No	Aspek Evaluasi	Instrumen	Hasil Capaian
1	Pemahaman konsep perlindungan anak	<i>Pre-test</i> dan <i>post-test</i>	Sebanyak 14 dari 18 kader (77,8%) mencapai kategori memahami. Nilai rata-rata meningkat dari 59,4 menjadi 81,1 dengan <i>N-Gain</i> sebesar 53,1%.
2	Kemampuan deteksi dini kekerasan anak	<i>Pre-test & post-test</i> dan Observasi simulasi	Sebanyak 15 dari 18 kader (83,3%) mampu melakukan deteksi dini dan simulasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Nilai rata-rata <i>post-test</i> sebesar 81,7 dan nilai simulasi sebesar 72,2.
3	Penguatan tata kelola PATBM	Telaah dokumen	Tersedia 50 eksemplar Buku Saku SOP Jalur Rujukan Perlindungan Anak.
4	Sistem pencatatan kasus	Telaah dokumen	Tersedia format pencatatan dan pelaporan kasus sebagai instrumen administrasi PATBM.

Sumber: Hasil Analisis Tim Pelaksana Kegiatan

6. Kendala yang Hadapi

Selama pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala, terutama perbedaan tingkat pemahaman awal kader serta keterbatasan waktu peserta karena sebagian kader memiliki aktivitas pekerjaan dan tanggung jawab sosial lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyampaian materi perlu dilakukan secara bertahap dengan pendekatan yang lebih sederhana dan kontekstual. Untuk mengatasi kendala tersebut, tim pengabdian menggunakan metode pembelajaran interaktif melalui diskusi, studi kasus, simulasi, serta menyediakan Buku Saku SOP dan instrumen pencatatan kasus sebagai media pendukung. Strategi ini membantu kader memahami materi secara lebih aplikatif sekaligus memberikan panduan kerja yang dapat digunakan setelah kegiatan selesai. Pendekatan tersebut sejalan

dengan konsep penguatan kapasitas komunitas yang menekankan bahwa keberhasilan program sosial tidak hanya bergantung pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada tersedianya dukungan sistem dan perangkat kerja yang memudahkan masyarakat menerapkan hasil pelatihan dalam praktik

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian pemberdayaan PATBM Kampung Jeflio ini menjawab tiga tujuan yang ditetapkan. Pertama, pemahaman kader mengenai prinsip perlindungan anak meningkat, ditunjukkan oleh kenaikan nilai rata-rata pretest-posttest dari 59,4 menjadi 81,1 (*N-Gain* 53,1%, kategori sedang), dengan 14 dari 18 kader (77,8%) mencapai kategori memahami. Kedua, kemampuan pencegahan dan deteksi dini kekerasan terhadap anak meningkat, ditunjukkan oleh nilai rata-rata posttest 81,7 dan nilai simulasi 72,2, dengan 15 dari 18 kader (83,3%) dinyatakan mampu melakukan deteksi dini serta simulasi pencegahan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Ketiga, mekanisme kelembagaan PATBM diperkuat melalui tersedianya 50 eksemplar Buku Saku SOP Jalur Rujukan Perlindungan Anak serta format pencatatan dan pelaporan kasus sebagai perangkat kerja pendukung keberlanjutan PATBM. Ketiga capaian tersebut konsisten dengan data yang disajikan pada Tabel 1 dan menunjukkan bahwa kegiatan telah memenuhi tujuan peningkatan kapasitas kader dan penguatan tata kelola perlindungan anak, meskipun keberlanjutan penerapannya di lapangan masih memerlukan pendampingan lanjutan.

Keberlanjutan program perlu didukung melalui pendampingan lanjutan kepada kader PATBM dalam penerapan SOP, pencatatan kasus, dan penguatan jejaring dengan layanan perlindungan anak. Kegiatan selanjutnya dapat dikembangkan dengan melibatkan orang tua, sekolah, tokoh masyarakat, dan pemuda agar sistem perlindungan anak berbasis masyarakat menjadi lebih luas dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungan pendanaan dan fasilitasi kegiatan, serta kepada PATBM Kampung Jeflio atas partisipasi dan kerja sama dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfandari, R., & Taylor, B. J. (2022). Community-based multi-professional child protection decision making: Systematic narrative review. *Child Abuse & Neglect*, 123, 105432. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105432>
- Amanda, C., & Helmi, R. F. (2025). Implementasi Program Perlindungan Anak

- Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk Meminimalisir Tindak Kekerasan terhadap Anak di Kota Padang. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(1), 353–362. <https://doi.org/10.54082/jupin.1256>
- Driscoll, J. J. (2020). The Role of Para Social Workers in Rural Communities in Uganda: Strengthening Community Resilience for the Protection of Children. *Child Abuse Review*, 29(5), 416–432. <https://doi.org/10.1002/car.2656>
- Ellermeijer, R. E. C., Veldhuizen, C. I. S., Bell, B., Ray, C., Krishanthan, T., Piedrahita, J. J. C., Reis, R., & Jordans, M. J. D. (2025). The Development of a Community-Led Child Protection Approach in Low- and Middle-Income Countries. *Child Abuse Review*, 34(6), e70074. <https://doi.org/10.1002/car.70074>
- Hillis, S., Mercy, J., Amobi, A., & Kress, H. (2016). Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates. *Pediatrics*, 137(3), e20154079. <https://doi.org/10.1542/peds.2015-4079>
- Nisa, N. K., Yuliani, D., & Susilawati. (2025). Community-Based Child Protection Organizing Design in Cianjur. *International Journal of Science and Society*, 7(2), 411–426. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v7i2.1455>
- Pananrangi, A. A., & Aswar, A. (2026). Keberlanjutan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat: Pelembagaan perlindungan anak melalui peraturan desa di Kabupaten Bone. *Jurnal Parahyangan Economic Development Review*, 12(1), 231–260. <https://doi.org/10.25123/vej.v12i1.10090>
- Panda, R. K., Mullick, L., Adhikari, S., Basu, N., & Kumari, A. (2020). Essence and Scope of Strengthening Community-Based Preventive Child Care and Protection Systems in India. *Institutionalised Children Explorations and Beyond*, 7(1), 47–55. <https://doi.org/10.1177/2349300319894866>
- Putra, R. S., Ihsan, A. R., Muhammad, F., & Mursalin, A. (2025). Hukum Islam dan Perlindungan Anak (Studi Kasus di Indonesia). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10801–10813. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2865>
- Rinah, S. A., Wulandari, F. D., & Prayoga, M. (2022). Evaluasi gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Poliyik Raja Haji*, 3(2), 773–786.
- Rizal, S. S., & Ulum, W. (2025). Empowering Cadres of Integrated Health Posts and Family Welfare Programs in Implementing Child Protection Based on Law No. 35 of 2014. *Ta'awun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 519–533. <https://doi.org/10.37850/taawun.v5i02.1063>
- Roche, S., & Flynn, C. (2020). Local child protection in the Philippines: A case study of actors, processes and key risks for children. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 8(3), 367–383. <https://doi.org/10.1002/app5.332>
- Rohmah, H. N. F., & Julianti, N. (2025). Pelatihan aktivitas PATBM (Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat) Desa Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2025. *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 524–532. <https://doi.org/10.36728/jpf.v6i2.4957>
- Sabon, M. N., & Miskan. (2025). Implementasi program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 5(1), 87–97. <https://doi.org/10.38156/jisp.v5i1.270>
- Sampasa-Kanyinga, H., Colman, I., Goldfield, G. S., Janssen, I., Wang, J., Hamilton, H. A., & Chaput, J.-P. (2020). Associations between the Canadian 24 h movement guidelines and different types of bullying involvement among adolescents. *Child Abuse & Neglect*, 108, 104638. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104638>
- Sari, N. K. D. P., Wirantari, I. D. A. P., & Lukman, J. P. (2025). Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Menangani Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Desa Tegal Kertha Kota

- Denpasa. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(2), 1–18. <https://doi.org/10.61292/shkr.214>
- Setyawati, R. (2019). Pengelolaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). *DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 3(2), 103–118. <https://doi.org/10.21831/diklus.v3i2.27278>
- Stark, L., Bancroft, C., Cholid, S., & Meliala, A. (2012). A qualitative study of community-based child protection mechanisms in Aceh, Indonesia. *Vulnerable Children and Youth Studies*, 7(3), 37–41. <https://doi.org/10.1080/17450128.2012.663947>
- Wahanisa, R., Pratiwi, P. C., Prihastuty, R., Rahmawati, D. A., Adiyatma, S. E., & Nugroho, S. S. (2025). Creating a Child-Friendly District: Strengthening Psychological First Aid Skills for Women's Empowerment and Child Protection (PPPA) Cadre in Pemalang Regency. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 8(2). <https://doi.org/10.15294/jphi.v8i2.32395>
- Wahda, M. A., Suhaeb, F. W., Saifuddin, Mario, & Jusnawati. (2025). Peningkatan kapasitas kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dalam pencegahan dan penanganan kasus pekerja anak di Kabupaten Wajo. *Jurnal Sulapa Eppa'*, 1(1), 104–110.
- WHO. (2016). Bulletin of the World Health Organization. *World Health Organization*, 163–164. <https://doi.org/0.2471/BLT.16.020316>
- Zakaria. (2025). Strategi Pemberdayaan Komunitas Dalam Sistem Perlindungan Anak Dan Perempuan Yang Diprakarsai Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 31(4), 276–283.